

**KOORDINASI KEPALA DESA DENGAN BPD (BADAN  
PERMUSYARAWATAN DESA) DALAM PEMBANGUNAN  
DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG  
SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

**Darwis Saleh**

**eJournal Ilmu Pemerintahan  
Volume 1, Nomor 4, 2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan

Pengarang : Darwis Saleh

NIM : 0902025052

Program : S1 Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program S1 Ilmu Pemerintahan Fisip Unmul.

Samarinda, 4 Oktober 2013

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Phil.I Ketut Gunawan, M.A**  
**NIP. 19631222 199002 1 001**

**Budiman, S.IP, M.Si**  
**NIP. 19770712 200501 1 003**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH BAGIAN PERPUSTAKAAN S1 IP**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Ilmu Pemerintahan	<b>Bagian Perpustakaan S1 IP</b>
<b>Volume</b> :	
<b>Nomor</b> :	
<b>Tahun</b> :	
<b>Halaman</b> :	

## **KOORDINASI KEPALA DESA DENGAN BPD (BADAN PERMUSYARAWATAN DESA) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BUMI RAHAYU KECAMATAN TANJUNG SELOR KABUPATEN BULUNGAN**

**Darwis Saleh<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Artikel ini menganalisis koordinasi Kepala Desa dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bumi Rahayu dengan indikator kerjasama, komunikasi dan kesatuan tindakan serta juga untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Kepala Dengan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi sudah terlaksana, namun masih ada kekurangan-kekurangan yang sangat berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Bumi Rahayu, kendati demikian ada beberapa upaya yang sudah dilakukan Kepala Desa dengan BPD agar proses koordinasi yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, dan pembangunan yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik.*

### **Pendahuluan**

Salah satu wujud dari peran pemerintah desa dalam mensejahterakan masyarakat desa yaitu melalui pembangunan. Adapun tujuan dasar dari pembangunan pedesaan adalah mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan yang berkepanjangan (walaupun kita tentu saja mengakui bahwa perhatian utama harus diberikan kepada tingkat maupun “pola” pengukuran pertanian, disesuaikan dengan tujuan strategis jangka panjang. Sedangkan inti dari pembangunan pedesaan adalah mendayagunakan tenaga kerja pedesaan, juga dipertimbangkan faktor-faktor penyedia sarana dan prasarana produksi, bahan baku, transportasi, dan keterampilan masyarakat. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera sesuai dengan visi pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi rakyat Indonesia, karena realisasinya berusaha menyentuh segala lapisan masyarakat, melalui pembangunan yang menyeluruh, menyebar luas ke seluruh pedesaan dan dengan menggali serta menggerakkan partisipasi masyarakat. Memadukan arah pembangunan sektoral maupun regional sesuai dengan kebutuhan esensial masyarakatnya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Darwis.JurIP@gmail.com

Kebijakan pelaksanaan dalam pembangunan desa adalah gambaran dari suatu proses pembangunan ke arah terciptanya Desa Swasembada sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan Pancasila. Dalam beberapa masalah diperlukannya upaya untuk menyelesaikannya. Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD adalah merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelaraskan berbagai pelaksanaan kegiatan pembangunan agar tidak terjadi kekacauan, percekocokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan kegiatan pembangunan didesa, sehingga terdapat kerja sama yang terarah dan usaha mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi/perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat.

Selama ini, kebijakan pembangunan di Desa Bumi Rahayu selalu bersipat top down dan sektoral dalam perencanaan serta implementasinya tidak terintegrasi. Perencanaan disusun tanpa melibatkan keseluruhan masyarakat yang berkaitan dengan kemiskinan, sebagaimana terinformasikan dalam data profil desa, ternyata sebagian besar masyarakat miskin masih berada di desa Bumi Rahayu, oleh karena itu, pembangunan harusnya menyentuh semua masyarakat di didesa sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

Pembangunan selama ini, lebih banyak diarahkan di bagian depan desa saja, hal ini menyebabkan pembangunan hanya terlihat dibagian depan desa saja sedangkan dibagian belakang desa belum tersentuh pembangunan secara utuh, kurangnya koordinasi seperti ini telah menimbulkan kecemburuan sosial bagi sebagian masyarakat desa khususnya yang ada dibagian belakang desa. Kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sarana pendidikan terbatas, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja.

Dari semua permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka dibutuhkan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD untuk mengatur pemerintahan desa terutama dalam pembangunan didesa. Pembangunan Desa Bumi Rahayu harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan Desa Bumi Rahayu akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut terutama yang menyangkut potensi manusia dan daya dukungnya. Agar gerak dan arah pembangunan Desa Bumi Rahayu senantiasa tertuju kepada kepentingan masyarakat di Desa Bumi Rahayu maka perlu adanya prinsip pokok kebijakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip pokok tersebut merupakan pedoman dalam mengelola dan mengendalikan pembangunan.

Artikel ini mengamati Koordinasi Kepala Desa dengan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan berfokus pada kerjasama, kesatuan tindakan dan komunikasi dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu.

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan. Data-data yang dikumpulkan selama kurang lebih satu bulan, dianalisis dengan analisis kualitatif. Data-data yang dipakai adalah data-data kualitatif.

Agar analisis ini punya pijakan teoritis, pada bagian berikut akan dibahas terlebih dahulu kerangka dasar teori/konsep. Sebelum memfokuskan bahasan pada pendiskualifikasian tersebut, gambaran umum tentang koordinasi dan pembangunan desa akan dicoba untuk dipaparkan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Koordinasi***

Kata koordinasi menurut Achmad Basyuni (2009) berasal dari “Co” dan “Ordinary” yang berarti Co Regulate. Dilihat dari pendekatan empiric dikaitkan dari segi etimologi koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga dari satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak lain, sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.

Menurut E.F.L. Brech dalam bukunya, *The Principle and Practice of Management* yang dikutip Handyaningrat (2002:54), koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

Sedangkan menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya.

Selanjutnya Awaluddin Djamin, koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.

Siagian (2001:110), koordinasi adalah pengaturan tata hubungan dari usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan bersama pula agar pembiayaan kerja dari berbagai orang/ kelompok dapat tersusun menjadi suatu kebulatan yang terintegrasi dengan cara seefisien mungkin.

Namun ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur koordinasi. Hasibuan (2006:88-89), menjelaskan ada beberapa indikator dari koordinasi, yaitu sebagai berikut:

#### ***a. Kerjasama***

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam

pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

*b. Kesatuan tindakan*

Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

*c. Komunikasi*

Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkataan komunikasi berasal dari perkataan *communicare*, yaitu yang dalam bahasa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi. Dengan demikian komunikasi merupakan hubungan antara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi.

***Pembangunan Desa***

Menurut Peet and Hartwick (2009) pembangunan merupakan sebuah upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti sebuah proses untuk mencapai

kehidupan yang sebelumnya dianggap tidak baik, atupun kurang baik, menjadi sebuah kondisi yang lebih baik.

Sedangkan menurut Nugroho dan Rochmin Dahuri (2004: 43) pembangunan dapat diartikan sebagai `suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk me-menuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.

Menurut Koentjaraningrat (1981:77) pembangunan desa diartikan sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan dimana pembangunan desa mengusahakan mewujudkan masyarakat sesuai dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi tanggungjawab Kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) PP No 72 tahun 2005 ditegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrenbangdes, hasil musyawarah tersebut di ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan dapat dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

## **Gambaran Umum**

### ***Deskripsi Geografis***

Desa Bumi Rahayu terletak di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan di bagian utara Provinsi Kalimantan Timur. Desa ini memiliki luas wilayah  $\pm$  99.67 Ha dan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jelarai Selor dan Desa Tengkapak Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jelarai Selor Kecamatan Tanjung Selor

### ***Jumlah Penduduk Berdasarkan umur***

Jumlah keseluruhan Desa Bumi Rahayu berdasarkan profil Desa Bumi Rahayu tahun 2012 yaitu 798 jiwa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 435 jiwa dan perempuan sebanyak 212 jiwa. Jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 212 KK.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Bumi Rahayu Menurut Kelompok Usia

No	Golongan Umur	Jumlah ( Jiwa )	%
1.	0 – 14 tahun	253	31.7 %
2.	15– 25 tahun	143	17.9 %
3.	26 – 39 tahun	228	28.6 %
4.	40 – 58 tahun	148	18.5 %
5.	> 59 tahun	26	3.5 %
	Jumlah	798	100 %

Dilihat dari tabel di atas, maka didapat kelompok umur yang kurang produktif adalah 0 – 14 tahun sebanyak 253 jiwa. Kemudian kelompok umur produktif 15 – 58 tahun sebanyak 519 jiwa. Dan kelompok umur tidak produktif adalah > 59 tahun yaitu 26 jiwa . Usia 15-58 tahun di atas kebanyakan yang masih menempuh pendidikan dan sebagian adalah bekerja sebagai pekerja swasta dan buruh pembuat batu bata.

*Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan*

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan dan pembangunan desa yang mempunyai potensi .

Tabel 2. Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah ( Orang )
1	Belum sekolah	71
2	Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	47
3	Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	57
4	Tamat SD/ sederajat	317
5	SLTP/ sederajat	132
6	SLTA/ sederajat	136
7	D-1	6
8	D-2	4
9	D-3	14
10	S-1	14

11	S-2	Tidak ada
12	S-3	Tidak ada
Total		798

### **Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu**

Dalam tulisan ini yang menjadi pokok bahasan Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

#### **a. Kerjasama**

Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan BPD sudah dilaksanakan dengan baik, Kepala Desa dengan BPD selalu melaksanakan rapat maupun musyawarah untuk membahas pembangunan di Desa Bumi Rahayu. Pembangunan yang dilaksanakan harus mendapatkan persetujuan dari kedua badan pemerintahan desa ini. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan BPD. Namun dalam proses pelaksanaan pembangunan masih ada beberapa bagian desa yang belum tersentuh pembangunan secara merata, khususnya masyarakat di bagian belakang desa masih mengeluhkan prasarana jalan yang masih banyak berlubang dan menghambat aktivitas masyarakat. Masyarakat khususnya yang berada di belakang desa mengharapkan adanya perhatian pemerintah desa untuk memperbaiki prasarana jalan di belakang desa. Selain itu masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rincian Pembangunan Desa Bumi Rahayu

No	Jenis Pembangunan	Lokasi	Proses Pelaksanaan	
			Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Timbunan Tanah untuk Badan jalan	RT. 01	√	
2	Pembuatan plang nama desa (Beton)	RT. 03	√	
3	Semenisasi Sarana Olahraga	Halaman Kantor Desa	√	
4	Lampu Taman	Halaman Kantor Desa	√	

Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan (Darwis Saleh)

5	Siring dan Gorong-gorong Plat Duickret	RT. 01, 03, 04		√
6	Pengerasan Jalan	RT. 01, 03, 04	√	
7	Pembuatan Jembatan Gantung	RT. 04		√
8	Pengerasan Jalan Lingkungan	RT. 03		√
9	Lanjutan Semenisasi Jl. Kantor Desa dan Sarana Parkir	RT. 03	√	
10	Pemagaran Kantor Desa	RT. 03		√
11	Pembangunan Kantor BPD dan LPM	RT. 03		√
12	Drainase Paret Pembuangan	Perumahan Pemda Km.9	√	
13	Jaln Usaha Tani	RT. 03		√
14	Siring Dan Penimbunan Lapangan Sepak Bola	RT. 04		√
15	Pembangunan Rumah Dinas Pemerintah Desa	RT. 03		√
16	Peningkatan Jalan Masuk SMK 3	RT. 03		√
17	Pengaspalan Jalan	RT. 01,02,03,04,05	√	
18	Pembangunan TPA	RT. 02		√
19	Pembuatan Jalan	RT. 03		√
Total Pembangunan Yang Terlaksana Dan Belum Terlaksana			7	12

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa RT 01 sampai dengan RT 04 merupakan RT yang ada dibagian depan desa sedangkan RT 05 sampai dengan RT 07 merupakan RT yang berada dibagian belakang desa. Melihat tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas bahwa rancangan pembangunan Desa Bumi Rahayu lebih difokuskan pada bagian depan desa dan memperlihatkan sedikit sekali pembangunan yang dilaksanakan dibagian belakang desa.

Selain itu, terlihat juga masih banyaknya pembangunan yang belum terlaksana seperti yang terlihat pada tabel di atas. Dalam RPJMDes yang sudah disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD masih banyak pembangunan yang belum terlaksana itu disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki desa untuk melaksanakan semua pembangunan yang sudah disepakati. Oleh sebab itu kerjasama ini perlu ditingkatkan lagi agar semua pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa kerjasama oleh Kepala Desa dengan BPD sudah terjalin dengan dengan baik. Namun demikian karena masih ada sebagian program pembangunan yang tidak terlaksana, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD perlu dipertahankan untuk program pembangunan yang belum terlaksana. dengan mempertahankan kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD diharapkan semua pembangunan yang sudah direncanakan bisa terlaksana.

#### ***b. Kesatuan Tindakan***

Kesatuan tindakan sudah terlaksana dengan baik, memang sering terjadi perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan BPD, namun perbedaan pendapat bukanlah penghambat dari kesatuan tindakan yang dilaksanakan, melalui perbedaan pendapat itu justru bisa didapatkan keputusan yang bersama-sama dimufakatkan. Sering sekali terjadi perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan BPD dalam pembahasan program pembangunan, kedua badan pemerintahan desa ini terlihat saling mempertahankan persepsi mereka dalam perencanaan pembangunan. Namun dari perbedaan pendapat tersebut keputusan yang didapatkan keputusan yang benar-benar disetujui oleh kedua badan pemerintahan desa ini.

Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan, kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengan BPD sudah baik. Namun demikian masih ada sebagian program pembangunan yang belum terlaksana yang ada di Desa Bumi Rahayu, maka kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengan BPD mesti bisa untuk dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum terlaksana, dengan mempertahankan kesatuan tindakan ini, semua pembangunan bisa terlaksana sesuai dengan apa yang sudah disepakati.

**c. Komunikasi**

Komunikasi yang dijalin antara Kepala Desa dengan BPD Bumi Rahayu sudah sangat baik dan efektif dalam keberhasilan koordinasi dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan di Desa Bumi Rahayu tidak terlepas dari komunikasi yang selalu terjaga dengan baik dan sangat harmonis. Komunikasi selalu dilakukan oleh Kepala Desa dengan BPD adalah untuk saling terus berhubungan satu sama lain agar proses pembangunan berjalan dengan sesuai yang sudah direncanakan, dan untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam proses pembangunan. Namun Kepala Desa dengan BPD harus menjaga komunikasi ini agar setiap pembangunan yang direncanakan bisa selalu berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga.

Komunikasi yang dilaksanakan sudah cukup baik, kedua badan pemerintahan desa ini memanfaatkan kesempatan-kesempatan tertentu untuk selalu berkomunikasi. Namun jarangnyanya BPD hadir ke kantor desa menimbulkan sedikit kesenggangan komunikasi antara kepala desa dengan BPD, hal tersebut membuat komunikasi antara kepala desa dengan BPD di wilayah formal sangat jarang dilakukan dan itu harus adanya kesadaran dari anggota BPD agar lebih sering untuk hadir ke kantor desa sehingga tidak menghambat pelaksanaan pembangunan. Jarangnyanya BPD hadir di kantor desa dikarenakan tidak adanya sarana kantor untuk BPD dapat bekerja maupun berkomunikasi secara maksimal. Itu terlihat pada RPJMDes dimana pelaksanaan pembuatan infrastruktur kantor BPD belum terlaksana.

**Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat**

Dalam koordinasi Kepala Desa dengan BPD Di Desa Bumi Rahayu tentunya memiliki factor-faktor yang mendukung dan juga menghambat proses berjalannya koordinasi Kepala Desa Dengan BPD. Berikut faktor-faktor pendukung dan penghambat selama pelaksanaan koordinasi Kepala Desa Dengan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu :

**a. Faktor Pendukung**

**1. Kunjungan Langsung Ke Masyarakat**

Kunjungan langsung kemasyarakat bisa memperkuat lagi koordinasi yang dijalin, selain itu dengan turun langsung ke masyarakat pemerintahan desa lebih tau apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan dari masyarakat dan sehingga Kepala Desa dan BPD bisa membahasnya bersama-sama tanpa harus memiliki perbedaan persepsi lagi.

**2. Persamaan visi dalam memajukan desa antara Kepala Desa dengan BPD**

Memiliki visi dalam memajukan desa selalu tertanam di dalam diri masing-masing badan pemerintahan desa ini, hal tersebut memudahkan kepala desa dengan BPD dalam berkoordinasi karena memiliki visi yang sama, selain itu

setiap kebijakan yang dibuat semuanya untuk memajukan Desa Bumi Rahayu. Menurut saya hal ini sangat baik dalam sebuah pembangunan, dengan persamaan visi seperti ini bisa terlepas dari kepentingan pribadi dan mempermudah koordinasi yang dilaksanakan.

3. *Dukungan dari masyarakat Desa Bumi Rahayu*

Dukungan dari seluruh masyarakat Desa Bumi Rahayu. Sehingga koordinasi dalam hal pembangunan desa serta hal-hal yang menyangkut kepentingan desa lainnya bisa diwujudkan dengan baik. Masyarakat desa juga harus ikut berpartisipasi karena dengan adanya kerjasama dengan pemerintah desa akan membantu meningkatkan pembangunan di Desa Bumi Rahayu.

Faktor pendukung dari koordinasi Kepala Desa dengan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu sudah dilakukan dengan baik, kepala desa bersama dengan BPD telah berupaya agar koordinasi yang dilakukan bisa selalu berjalan dengan baik dan harmonis, upaya-upaya yang dilakukan melalui beberapa faktor pendukung dari berjalannya koordinasi seperti yang telah diuraikan peneliti sebelumnya adalah untuk memajukan pembangunan di Desa Bumi Rahayu sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat desa, selain itu upaya tersebut agar perangkat desa bisa lebih bekerjasama dengan baik dengan anggota BPD dalam melaksanakan pembangunan di Desa Bumi Rahayu.

Dukungan penuh dari setiap elemen masyarakat Desa bumi Rahayu sangat diperlukan agar koordinasi yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan BPD bisa berjalan dengan baik. Pemahaman masyarakat akan pembangunan yang dilaksanakan juga harus ditingkatkan agar masyarakat juga bisa menjadi pengontrol dari setiap kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

**b. Faktor Penghambat**

1. *Minimnya anggaran dari pemerintah daerah maupun instansi terkait*

Kurangnya anggaran Daerah yang di berikan, karena dengan kurangnya anggaran yang diberikan akan berpengaruh pada koordinasi antara kepala desa dengan BPD termasuk pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Terbatasnya ruang gerak pemerintah desa dalam berkoordinasi dan pembangunan karena kurangnya anggaran. Kepala Desa bersama BPD akan berusaha setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Bumi Rahayu dalam sektor pembangunan.

2. *Infrastruktur kantor BPD yang belum ada*

Perlu adanya kantor untuk BPD agar BPD dapat bekerja dengan maksimal, satu ruangan yang dimiliki BPD saat ini sangat tidak sesuai dengan apa yang sudah dituntukan untuk bekerja secara maksimal. Kekurangan ruangan ini juga menurut saya sangat berpengaruh dengan koordinasi antara kepala desa dengan BPD seperti yang sudah peneliti uraikan sebelumnya. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah desa agar kinerja BPD bisa menjadi maksimal

dan koordinasi antara dua badan pemerintahan desa ini bisa selalu terjalin dengan baik.

Faktor penghambat dari koordinasi kepala desa dengan BPD dalam pembangunan di Desa Bumi Rahayu adalah minimnya anggaran dari daerah membuat proses berjalannya koordinasi dalam pembangunan pun terhambat, pemerintah Desa Bumi Rahayu sangat mengharapkan sekali anggaran yang cukup agar setiap program pembangunan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, tidak adanya infrastruktur kantor BPD juga menghambat proses koordinasi yang berjalan. BPD membutuhkan kantor yang memadai agar BPD bisa bekerja secara maksimal dan bisa bertemu setiap hari kerja dengan kepala desa untuk dapat terus bekoordinasi didalam wilayah yang formal.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dilapangan mengenai Koordinasi Kepala Desa Dengan BPD Dalam Pembangunan Di Desa Bumi Rahayu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, serta penyajian data dan pembahasannya telah diuraikan dalam penelitian ini maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kerjasama oleh Kepala Desa dengan BPD sudah terjalin, baik melalui rapat-rapat desa maupun musyawarah desa. Namun masih ada sebagian program pembangunan yang tidak terlaksana yang disebabkan oleh terbatasnya anggaran yang dimiliki.
2. Kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengan BPD Bumi Rahayu sudah terlaksana. Kepala Desa dan BPD mampu menyatukan pendapat mereka meskipun sering sekali terjadi perbedaan pendapat, namun hal tersebut tidak pernah memunculkan konflik diantara Kepala Desa dengan BPD. Adanya upaya-upaya yang dilakukan antara Kepala Desa dengan BPD untuk menyatukan pendapat mereka dalam menentukan arah pembangunan sehingga dengan upaya-upaya tersebut kedua badan pemerintahan desa ini bisa menyatukan pesepsi mereka untuk menentukan arah pembangunan di Desa Bumi Rahayu.
3. Komunikasi dalam koordinasi antara Kepala Desa Bumi Rahayu dengan BPD dalam pembangunan sudah terjalin. Jarangnya BPD hadir ke kantor desa bisa menghambat proses komunikasi yang terjalin antara Kepala Desa dengan BPD. Namun demikian, komunikasi tetap terlaksana meskipun BPD jarang hadir ke kantor desa, Kepala Desa dengan BPD tetap berkomunikasi baik melalui telpon langsung dan melalui SMS, selain itu Kepala Desa dan BPD juga memanfaatkan waktu yang ada di luar kantor desa untuk tetap saling berkomunikasi.
4. Faktor Pendukung yang menjadi pendorong dalam koordinasi Kepala Desa dengan BPD adalah kunjungan langsung kemasyarakat yang menjadikan proses koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD bisa semakin harmonis dan lebih mudah untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat sehingga

tidak menimbulkan perbedaan pendapat antara Kepala Desa dengan BPD. Persamaan visi dalam memajukan menjadikan Kepala Desa dengan BPD bisa bekerjasama dengan baik sehingga Kepala Desa dengan BPD benar-benar melaksanakan pembangunan untuk memajukan Desa dan yang terakhir adalah dukungan dari masyarakat Desa Bumi Rahayu itu sendiri, karena dukungan dari masyarakat itu sendiri bisa membantu koordinasi Kepala Desa dengan BPD menjadi lebih baik lagi.

5. Faktor Penghambat yang menjadi kendala dalam koordinasi Kepala Desa Bumi Rahayu dengan BPD adalah minimnya anggaran yang diberikan pemerintah daerah sehingga menghambat proses pelaksanaan pembangunan dan secara tidak langsung juga mengganggu proses koordinasi. Dan tidak adanya kantor untuk anggota BPD itu sendiri menjadikan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD menjadi terhambat.

### **Saran**

1. Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kerjasama antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung dengan baik perlu dipertahankan untuk pelaksanaan pembangunan yang belum berjalan. Dengan mempertahankan kerjasama, diharapkan program pembangunan yang belum terlaksana dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.
2. Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka kesatuan tindakan antara Kepala Desa dengan BPD yang berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum berjalan. Pemerintah Desa dan BPD juga harus lebih memahami dan mengetahui seluruh kebutuhan dari masyarakat dalam hal pembangunan agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses menentukan pembangunan di Desa Bumi Rahayu.
3. Karena masih banyak program pembangunan yang belum dilaksanakan, maka komunikasi antara Kepala Desa dengan BPD yang sudah berlangsung mesti dipertahankan untuk pelaksanaan program pembangunan yang belum berjalan. Selain itu perlunya kesadaran bagi anggota BPD agar lebih sering hadir ke kantor desa untuk melaksanakan kewajibannya dan lebih mempermudah dalam berkomunikasi dengan Kepala Desa. Perlunya kantor untuk anggota BPD agar BPD dapat bekerja secara maksimal dan bisa dengan mudah untuk berkomunikasi dengan BPD. Selain itu menjaga komunikasi yang sudah terlaksana dengan baik agar koordinasi yang dilaksanakan bisa menghasilkan pembangunan yang lebih baik lagi.
4. Kepala Desa dengan BPD juga perlu mempertahankan faktor-faktor yang sudah mendukung proses pelaksanaan koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD Bumi Rahayu untuk pelaksanaan program pembangunan

yang belum berjalan. Perlunya dukungan baik dari Pemerintah, dan instansi terkait serta Masyarakat karena dengan adanya kerjasama diantaranya maka akan terjalin suatu hubungan kerjasama yang akan berdampak positif bagi koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD. Selain itu perhatian pemerintah desa agar adanya kantor sendiri untuk anggota BPD agar bisa lebih meningkatkan lagi kinerjanya dalam melaksanakan pembangunan, dengan adanya kantor sendiri BPD bisa lebih sering lagi hadir dikantor desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad.B (2009). “*Koordinasi dan hubungan kerja: Diklat Provinsi DKI Jakarta*”. Handout pada DIKLATPIM IV RRI7 IPBI. Jakarta : Widyaiswara Madya
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Conyers. 1984. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Dwipayana, AAGN Ari, dkk. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta : IRE Press.
- Ginandjar, K. 1997. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Cides
- Hasibuan. 2005. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- HAW. Widjaja. 2006. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia: Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 2007*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Handyaningrat. 2002. *pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Gramedia.
- Ibrahim, Jabal Tarik. 2003. *Sosiologi Pedesaan*. Malang: Universitas Muhamadiyah Malang.
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Koentjaraningrat. 1984. *Partisipasi dalam Pembangunan*, dalam LP3ES. (1984). Jakarta: LP3ES.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2001. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*. Bandung: Bumi Aksara.
- Marsuki. 1994 . *Sistem Perumahan Sosial Indonesia, Dalam Center For Urban Studies (1994)*. Jakarta: Center For Urban Studies.
- Moleong Lexi j. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT .Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1984. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT.Bina Aksara.

- Nugroho. 2011. *Bahan Ajar: Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Medan : UNIMED.
- Patton M,Q. 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif: Terjemahan Priyadi, Budi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peer dan Hartwick. (Eds) 2001. *Pengantar pembangunan* .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjafrizal. 1994. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ja'far. (Eds) 2007. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni.
- Slamet. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Peran Serta*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Soekanto, Soejorno. 2001. *Kedudukan Kepala Desa Sebagai Hakim Perdamaian*. Jakarta: CV. Rajawali
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli dan Utuh*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

#### **Sumber Lain :**

- Budiman. A. 2011. *Pengertian Pembangunan online: Pembangunan* [online]. Tersedia: [http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011\\_08\\_01\\_archive.html](http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011_08_01_archive.html) [1 Agustus 2011]
- Deddy T.Tikson. 2011. *Pengertian Pembangunan online: Pembangunan* [online]. Tersedia: [http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011\\_08\\_01\\_archive.html](http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011_08_01_archive.html) [1 Agustus 2011]
- Grigg. (2012). *pengertian desa menurut para ahli*. [online]. Tersedia: <http://desasambak.blogspot.com/2012/01/pengertian-desa-menurut-para-ahli.html> [5 Januari 2012]
- Hariyana,Octavia.L, Khairunisa.R. (2010). *Perbandingan Administrasi Negara*. [Online]. Tersedia: <http://xa.yimg.com/kq/groups/22999204/424375482/name/Makalah.html> [April 2010].
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005.
- Siagian. 2011. *Pengertian Pembangunan online: Pembangunan* [online]. Tersedia: [http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011\\_08\\_01\\_archive.html](http://ilyas-segeri.blogspot.com/2011_08_01_archive.html) [1 Agustus 2011]
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004